

# RELAWAN PROJO DALAM LENSA *POLITICAL IDOLATRY*: DARI IKRAR PENGAWAS HINGGA AKTOR MESIN POLITIK JOKOWI

Winda Safitri

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena *political idolatry* (idolatri politik) dalam tubuh Pro-Jokowi (Projo) dan bagaimana kondisi tersebut membentuk karakter serta orientasi politik mereka sebagai organisasi relawan sepanjang pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo (2014–2024). *Political idolatry* yang tercermin dari loyalitas personal terhadap Jokowi telah menghambat Projo untuk menjalankan peran kritis sebagai pengawas kekuasaan. Alih-alih memperkuat demokrasi, Projo justru terkooptasi ke dalam struktur kekuasaan, mengikis fungsi kontrol masyarakat sipil dan memperlemah *civic culture*. Analisis berdasarkan data primer berupa wawancara dengan pengurus aktif Projo dan akademisi, serta data sekunder berupa studi literatur dan laporan media menunjukkan bahwa pada periode pertama pemerintahan Jokowi (2014–2019), Projo masih berperan sebagai entitas masyarakat sipil meskipun terbatas. Namun, pada periode kedua (2019–2024), Projo semakin kehilangan independensinya, menjadi alat politik pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Dampaknya, kontrol Projo terhadap pemerintah melemah, toleransi terhadap perbedaan pendapat berkurang, dan kritik nyaris tidak terdengar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan revitalisasi gerakan relawan politik yang independen dan kritis untuk menjaga daya tahan demokrasi dari ancaman otoritarianisme.

**Kata kunci:** *political idolatry*, Projo, masyarakat sipil, kualitas demokrasi, Joko Widodo

**PROJO VOLUNTEERS THROUGH THE LENS OF POLITICAL  
IDOLATRY: FROM OVERSIGHT ADVOCATES TO JOKOWI'S POLITICAL  
MACHINE**

**Winda Safitri**

**ABSTRACT**

*This research explores the phenomenon of political idolatry within Pro-Jokowi (Projo) and its influence on the organization's character and political orientation as a volunteer movement during Joko "Jokowi" Widodo's presidency (2014–2024). Political idolatry, reflected in personal loyalty to Jokowi, has prevented Projo from fulfilling its critical role as a power watchdog. Instead of strengthening democracy, Projo has been co-opted into the power structure. This has eroded the oversight function of civil society and weakened civic culture. The analysis relies on primary data from interviews with active Projo leaders and academics. It also draws from secondary data, including literature studies and media reports. The findings show that during Jokowi's first term (2014–2019), Projo still functioned as a civil society entity, though its role was limited. However, in Jokowi's second term (2019–2024), Projo lost its independence and became a tool of the government to prolong its power. As a result, its oversight of the government weakened, tolerance for dissent diminished, and criticism became nearly absent. This study concludes that revitalizing an independent and critical political volunteer movement is essential for preserving the resilience of democracy against the threat of authoritarianism.*

**Keywords:** *political idolatry, Projo, civil society, democratic quality, Joko Widodo*